

kemiskinan di Indonesia tidak bisa diatasi dengan aspek kebebasan sipil karena dengan adanya kebebasan dapat disalahgunakan oleh para oknum elite. Dari simpulan yang dipaparkan, maka rekomendasi yang bisa disampaikan terkait kebijakan dalam mengentaskan kemiskinan dengan melalui indeks demokrasi (Aspek Kebebasan Sipil Aspek Hak-Hak Politik dan Aspek Lembaga Demokrasi), sebagai berikut:

1. Aspek kebebasan sipil perlu diperhatikan dengan mengarah pada kebijakan utama yaitu dalam mengentaskan kemiskinan yang dimana dengan adanya kebebasan bagi setiap individu maka akan memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan namun kebebasan sipil di Indonesia memberikan masalah sehingga diharapkan dapat membatasi kebebasan yang memunculkan tindakan-tindakan yang dapat menghambat pembangunan termasuk demonstrasi dengan melalui undang-undang yang tegas dan supremasi hukum yang adil.
2. Aspek hak-hak politik memberikan gambaran adanya kontribusi dari semua pihak termasuk masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Diharapkan pemerintah dapat memberikan pembinaan maupun memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik guna memberikan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat. Peningkatan aspek hak-hak politik yang berorientasi pada peran serta atau partisipasi semua pihak dapat mengurangi kemiskinan.
3. Aspek lembaga demokrasi memberikan gambaran adanya peran-peran institusi dalam menjalankan kebijakan dengan baik sesuai tanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan publik bisa mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga mengalami penurunan. Perlu diperhatikan lagi dalam meningkatkan kualitas pada aspek lembaga demokrasi agar memberikan kontribusi dalam tujuan pembangunan yang lebih baik termasuk mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia). *Journal Administrasi*, 1(5), 43–49. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v5i1.2417>
- Adnan, G., & Amri, K. (2021). Do gender empowerment and democracy reduce poverty rate? A cross-provinces evidence from western Indonesia. *Economics & Sociology*, 14(3), 54–71. <https://doi.org/10.14254/2071-789x.2021/14-3/3>
- Adityawarman, A. (2020). Pembangunan Politik dan Kualitas Demokrasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 397-409.
- Afzal, A., Mirza, N., & Arshad, F. (2021). Pakistan's Poverty Puzzle: Role Of Foreign Aid, Democracy & Media. *Economic Research-Ekonomska Istrazivanja*, 34(1), 368-382
- Arianto, J. (2017). NGO atau LSM Sebagai Sarana Membangun Budaya Politik Indonesia. *Jurnal PPKn & Hukum*, 12(2), 1–15. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/view/4688>
- Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, 1(2), 55-61.
- Arsyad, L. (2016). *“Ekonomi Pembangunan; Edisi Ke-5”*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Assadzadeh, A., & Pourqoly, J. (2013). The Relationship between Foreign Direct Investment,

- Institutional Quality and Poverty: Case of MENA Countries. *Journal of Economics, Business and Management*, 1(2), 161–165. <https://doi.org/10.7763/joebm.2013.v1.35>
- Awal, M. (2012). Ghana: Demokrasi, Reformasi Ekonomi dan Pembangunan, 1993-2008. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan di Afrika*, 14 (1), 97-118.
- Bariyah, N. (2022). Demokrasi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 21 No. (2), Hal. 53 -64. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.23071>
- Bojang, M. B. S. (2017). Critical Issues Affecting Africa's Development: EGovernment, Democracy and Democratic Principles, And Governance as an Alternative for SocioEconomic Development in Africa. *International Journal of Youth Economy*, 1(1), 41–55. <https://doi.org/10.18576/Ijye01014>.
- Chujor, F. O. (2017). *Democracy as an Instrument of Poverty Reduction in Africa : An Appraisal of the Nigerian Experience*. 3(2), 33–40.
- Daven, M. (2016). Korupsi Dan Demokrasi. *Jurnal Ledalero*, 15(1), 46. <https://doi.org/10.31385/jl.v15i1.28.46-73>
- Fajri, M., Delis, A., & Amzar, Y. (2019). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Keterbukaan Daerah Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(2), 99–107.
- Fahmi, I. (2019). Dasar-Dasar Perekonomian Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. Depok
- FISIP Universitas Brawijaya. (2019). *Kemunduran Demokrasi dalam Pemerintahan Jokowi: Nyalakan Tanda Bahaya*. <https://fisip.ub.ac.id/?p=9085&lang=id>.
- Firmanzah. (2012). *Demokrasi, Kemiskinan dan "Inequality"*. Diakses melalui: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2012/10/30/11200060/~Nasional?page=all#page2>
- Ghozali, I. (2013). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Badan Penerbit Dan Pembangunan, 3(4).
- Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendrawan, A. (2020). *Demokrasi Brazil: Bagaimana Brazil Melewati Fase Transisi dan Membangun Konsolidasi Demokrasi ?* 7(2), 122–137.
- Hussaini, M. (2014). Poverty Alleviation Programs in Nigeria: Issues and Challenges. *International Journal of Development Research*, 4(3), 717–720. <https://www.researchgate.net/publication/316701170%0>.
- Indro, N. P. Y. (2013). Kemiskinan Global Sen Amartya. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 9(13), 23–34. http://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiah_Hubungan_Internasiona/article/view/538
- Jhingan, M. L (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kim, T., Kwon, H., Lee, J., & Yi, I. (2016). Poverty, Inequality, and Democracy: "Mixed Governance" and Welfare in South Korea. *Journal of Democracy*, 22(3), 120-134
- Kuncoro, M (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Margareni, N. P. A. P., Djayastra, I. K., & Yasa, I. G. . M. (2016). Faktor-Faktor Yang

- Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Bali. *Piramida Jurnal Kependudukan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 12(1), 101–110.
- Martha, J., Bainus, A., & Heryadi, D. (2015). Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi terhadap Kesejahteraan: Teori dan Realita (Studi Kasus: Indonesia). *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 4.
- Ma' Arif, S. (2012). Masalah Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Lokal: Pengalaman Kota Bandar Lampung. *Jurnal Publica*, 2(1), 1-13.
- Nihaya, M. (2016). Demokrasi dan Problematikanya di Indonesia. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 10(2), 35-49.
- Rasbin, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran: Studi Di Kota Yogyakarta dan Malang. *Kajian*, 23(2) 129-142.
- Roberto, P., & Araujo, G. De. (2015). *Working Paper The Impact of Democracy in Inequality , Poverty and Development*.
- Seekings, J. (2013). Poverty and Inclusive Growth in South Africa since 1994. In *Centre for Social Science Research Working Paper* (Issue 321).
- Sen, A. (2011). Quality of Life:India vs China.*The New York Review Of Book*, 12(2)
- Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I., & Pratama, A. (2021). Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi- Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* (Vol. 1, No. 2, pp. 91-108).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhardin, Y. (2012). Peranan Negara dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 302-317.
- Sujarwoto, S. (2015). Desentralisasi, Dinasti Politik dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 1-6
- Sunaryo. (2017). *“Etika Berbasis Kebebasan Amartya Sen: Intergasi Kebebasan Dalam Pilihan Sosial, Demokrasi, dan Pembangunan”*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutarto, D. (2019). Implementasi Nilai Demokrasi Sebagai Solusi Bagi Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial. *Petita*, 1(1), 75-86.
- Syaukani., Gaffar, A., & Rasyid, R., (2012). *“Otonomi Daerah: Dalam Negara Kesatuan.”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tambunan, T. T. H. (2012), *Perekonomian Indonesia: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Tambunan, T. T. H. (2015), *“Perekonomian Indonesia: Era Orde Lama Hingga Jokowi.”* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Tuya, N. (2013). Democracy and Poverty: A Lesson from Mongolia. *Mongolian Journal of International Affairs*, 18, 11–15. <https://doi.org/10.5564/mjia.v0i18.66>
- Wahyuni, RNT, & Damayanti, A. (2014). Faktor-Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan Di Provinsi Papua: Analisis Spasial Heterogenitas. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 14 (2), 128-144.

- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi Eviews*. UPP STIM YKPN.
- Widuri, D. R. (2021). Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Hubungan Warga di Eropa: Analisis European Social Survey 2002-2018. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(2), 306-318.
- Yacoub, Y., & Apriani, N. (2019). Determinasi Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding SATIESP*, 143-152
- Yolanda, Y. (2019). Pengaruh Korupsi, Demokrasi dan Politik Terhadap Kemiskinan di Delapan Negara ASEAN dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 845-854.
- Yustika, E. A. & Sallama, I. N., (2012). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Zaini, M. (2019). Kebijakan Pemberlakuan Politik Demokrasi dan Pengaruhnya terhadap Kesejahteraan Sosial. *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya*, 25(1), 54-67.
- Zikmund, W. G., Carr, J.C., Babin, B., & Griffin, M. (2013). *Business Research Methods (Eighth)*.